



CRITICAL ECOSYSTEM
PARTNERSHIP FUND



Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir
Berbasis Kearifan Lokal Dan Pemanfaatan Hasil Laut Yang Ramah
Lingkungan Di Negeri Waai Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku
Tengah, Kota Ambon

Yayasan sauwa Sejahtera (YASTRA) Maluku



LAPORAN AKHIR PROYEK

(10 Juni 2022 – 9 juni 2023)

I. INFORMASI PROYEK

Wilayah pendanaan	:	Maluku
KBA	:	Bentangan laut Buru
Strategic Direction (skala kecil)	:	1. Mengatasi ancaman terhadap spesies prioritas tinggi 2. Mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan oleh Masyarakat dilokasi dan koridor prioritas 3. Memperkuat aksi berbasis Masyarakat untuk melindungi spesies dan Kawasan laut
Nama Proyek	:	Pemberdayaan Masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya pesisir berbasis kearifan local dan pemanfaatan hasil laut yang ramah lingkungan di negeri Waai Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah
Nomor Laporan	:	019/PHK-1.2.4.b/VI/2022
Periode Waktu	:	12 bulan (satu tahun)
Disampaikan oleh	:	Elson Haumahu
Tanggal	:	31 Agustus 2023

HIBAH CEPF

a) Dalam USD	:	USD 18.307,14
b) Dalam mata uang local	:	Rp. 256.300.000
Kontribusi Mitra	:	
Periode program	:	12 bulan
Lembaga pelaksana	:	Yayasan Sauwa Sejahtera (YASTRA) Maluku

II. RINGKASAN PROYEK

Program ini berada pada KBA bentangan laut Buru, dengan sasaran program di negeri Waai kecamatan Salahutu kabupaten Maluku Tengah, dengan persoalan yang dihadapi adalah pendapatan masyarakat nelayan sangat tergantung pada harga pasar yang umumnya lebih menguntungkan pada pedagang ataupun harga beli Cold Storage yang umumnya rendah dan pendampingan dari Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten maupun provinsi dirasakan tidak menyentuh kebutuhan pengembangan usaha pengolahan perikanan di negeri Waai.

➤ Capaian

○ Output yang berhasil diwujudkan :

- ✓ Peta partisipatif wilayah pesisir dan area perlindungan laut desa seluas 50 ha di desa Waai, didukung oleh semua peserta kegiatan (pemerintah negeri, Saniri negeri, tokoh adat, tokoh agama tokoh Pendidikan, Perempuan dan pemuda)
- ✓ Kesepakatan perlindungan keanekaragaman hayati dan pengelolaan wilayah pesisir oleh masyarakat negeri Waai terbangun secara partisipatif melalui peraturan Negeri (PERNEG)
Masyarakat sangat menginginkan perlindungan terhadap sumber daya alam yang selama ini dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan juga menghidupkan Kembali KEWANG yang selama ini tidak berfungsi padahal fungsi mereka adalah melindungi sumber daya alam. Maka dengan adanya PERNEG yang telah dibuat peserta kegiatan (perwakilan Masyarakat) dan disahkan oleh pemerintah kabupaten Maluku Tengah, maka fungsi kewang akan berjalan sebagaimana mestinya (perlindungan sumber daya alam darat dan laut)
- ✓ Kelompok perempuan dan laki-laki di desa Waai mampu menciptakan produk makanan olahan berbahan dasar ikan dari praktek penangkapan ikan yang ramah lingkungan
20 peserta yang terlibat dalam pelatihan mempunyai kemampuan menyerap materi pelatihan yang disajikan oleh narasumber disebabkan mereka sangat mengikuti dengan serius kegiatan yang dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir tanpa ada izin atau tidak hadir dalam pertemuan/pelatihan. Disamping itu pula Masyarakat negeri Waai belum pernah mengikuti pelatihan pembuatan bakso dan abon memakai bahan dasar ikan.

○ Output yang tidak berhasil diwujudkan :

Pemerintah Negeri Waai dapat menyusun RPJMDesa dan RKPDesa dengan baik yang dapat diterima oleh pemerintah kabupaten Maluku Tengah

Staf pemerintahan negeri Waai dan Saniri negeri Waai telah mendapatkan pelatihan menyusun RPJMDesa dan RKPDes dari pihak pemerintahan kecamatan Salautu kabupaten Maluku tengah

○ Capaian penting lain yang muncul meski tidak menjadi output program

Saat sosialisasi program yang hanya menasar untuk Peraturan Negeri (PERNEG) laut mendapat banyak usulan bahkan seluruh peserta mengharapkan bukan saja perlindungan sumber daya alam di laut tapi juga didarat disebabkan karena kondisi sumber daya alam didarat telah hancur, yang mengakibatkan kondisi lautpun menjadi rusak. Disamping itu pula dengan adanya Peraturan Negeri (PERNEG) darat dan laut maka fungsi kewang yang terdiri dari kewang darat dan laut berjalan dengan baik untuk melindungi sumber daya alam darat dan laut.

- Tantangan yang dihadapi
 - Kondisi alam tidak bersahabat (hujan dan angin cukup kuat)
 - Keuangan tidak cukup dikarenakan penambahan kegiatan (pembuatan PERNEG darat), dan perjalanan ke Masohi (Pemda Maluku tengah) beberapa kali kali pulang pergi (dan sampai dengan laporan ini dibuat YASTRA masih tetap pulang pergi ke Masohi untuk konsultasi PERNEG)

- Kesimpulan
 - Alam akan Lestari dengan adanya PERNEG dan fungsi KEWANG akan berjalan dengan maksimal serta spesies-spesies penting akan tetap terlindungi
 - Tata Kelola habitat dan KBA akan berjalan dengan maksimal yang dilakukan oleh Pemerintah negeri, Saniri negeri dan Lembaga adat
 - Kesjahteraan Masyarakat akan meningkat teristimewa Perempuan-perempuan yang mengikuti pelatihan bakso dan obon yang memakai bahan dasar ikan
 - Dengan demikian, maka Masyarakat negeri Waai mampu mengimplementasikan kesepakatan tata Kelola untuk melindungi laut dan pesisir sebesar 50 hektar disamping itu pula dapat melindungi darat (hutan) serta spesies yang terlindungi dengan baik dan juga Masyarakat memiliki sumber pendapatan lain berupa pendapatan alternatif berbahan dasar ikan

III. CAPAIAN

Objective telah dicapai oleh program dengan terpenuhinya indikator-indikator sebagai berikut :

- ✓ Tercapainya tata kelola perikanan untuk melindungi kawasan laut seluas 50 ha
Pertemuan dihadiri oleh pemerintah negeri Waai, Saniri negeri Waai, Lembaga adat negeri Waai, tokoh Pendidikan negeri Waai, tokoh agama negeri Waai, perwakilan negeri Waai dan pemuda (kalesang) negeri Waai, Yang menghasilkan peta partisipatif yang berisikan ruang-ruang peruntukan pengelolaan sumberdaya wilayah darat, pesisir dan pesisir, ada dokumen kesepakatan dan dokumen peraturan negeri (PERNEG), peaksanaan kegiatan dilakukan di Gedung serbaguna negeri Waai dan Gedung serbaguna gereja GPM Waai. Kegiatan mulai berjalan dari bulan Juli 2023 dan berakhir di bulan Nopember 2023.
- ✓ Terbentuknya peraturan negeri tentang pengelolaan sumber daya pesisir negeri Waai
Pada bulan Agustus 2023 mulailah diadakan pertemuan antara pemerintah negeri Waai, Saniri negeri Waai, Lembaga adat negeri Waai, tokoh Pendidikan negeri Waai, tokoh agama negeri Waai, perwakilan negeri Waai yang difasilitasi oleh YASTRA di Gedung serbaguna negeri Waai dan Gedung serbaguna gereja GPM Waai dan menghasilkan berupa PERNEG yang terdiri darat dan laut dimana untuk darat terdiri dari 7 Bab 27 pasal 65 ayat 135 sub ayat. Sedangkan pesisir/laut terdiri dari 5 bab 18 pasal, 63 ayat dan 53 sub ayat. Sehingga totalnya menjadi 12 bab 45 pasal 128 ayat dan 181 sub ayat
Permintaan Masyarakat saat pertemuan agar YASTRA bukan saja membuat PERNEG di laut dan pesisir tadi juga didarat, karena laut bisa menjadi rusak jika darat tidak diperhatikan.
- ✓ Sekurang kurangnya dua produk olahan makanan berbahan dasar ikan yang diproduksi masyarakat negeri Waai

Pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan bakso dan abon memakai bahan dasar ikan dikuti oleh Perempuan-perempuan yang berasal dari negeri Waai sebagai perwakilan yang ditunjuk oleh pemerintah negeri Waai dan ketua PKK negeri Waai. Kegiatan dilaksanakan di Gedung serbaguna negeri Waai yang difasilitasi oleh TIM YASTRA dengan nara sumber yang memiliki Pendidikan cukup dan beliau adalah juru masak di hotel Sea yang memiliki kemampuan luar biasa.

Output telah dicapai oleh program dengan terpenuhinya indikator-indikator sebagai berikut :

Output 1 telah dicapai oleh program ini yakni Masyarakat Waai menetapkan tata kelola wilayah pesisir dan melakukannya dengan bertanggung jawab

Indikator pertama adalah :

Terdapat area perlindungan wilayah pesisir sekurang-kurangnya 50 Ha

Areal perlindungan yang menjadi sasaran program ini sebesar 50 hektar adalah terletak di dusun kelapa dua yang memiliki terumbu karang dan

depan negeri Waai yang rusak dikarenakan sistim penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan racun ikan, dan pengabilan kayu bakar serta kayu penyangga ombak. 30 hektar terumbu karang dan lamun yang berada tepat di depan perairan negeri Waai dan dusun kelapa dua. Sedangkan 20 hektar lainnya adalah mangrove yang juga terletak di pintu masuk negeri Waai (batas wilayah negeri Waai dan negeri Tulehu) dan pesisir negeri Waai

Indikator kedua adalah :

Masyarakat Waai mengikuti pelatihan pemetaan partisipatif dengan serius

Melalui kegiatan pemetaan partisipatif, maka kegiatan ini dilakukan oleh pemudah cinta lingkungan negeri Waai yang menamakan dirinya adalah organisasi Kalesang negeri Waai. Berhasil mengikuti pelatihan dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan oleh narasumber atas nama " Marthin W. Leuna, yang dilaksanakan di Gedung serbaguna negeri Waai pada tanggal 15 bulan oktober 2022. Pelatihan ini berguna bagi mereka untuk bisa melakukan input data dan penggambaran peta.

Indikator ketiga adalah :

Masyarakat melakukan input data lapangan dan penggambaran peta potensi sesuai petunjuk.

Pemudah kalesang negeri Waai setelah memahami tentang tata cara pemetaan partisipatif maka oleh mereka berhasil melakukan input data lapangan dan membuat/penggambaran peta potensi wilayah pesisir sesuai petunjuk yang telah disampaikan. Penggambaran dilaksanakan di sekretariat kalesang yang diikuti oleh 8 orang pemudah pada tanggal 29 oktober 2022

Indikator keempat adalah :

Masyarakat menyepakati tata kelola wilayah pesisir

Tingginya ketergantungan masyarakat pesisir negeri Waai kepada laut, berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan. Di antaranya, adalah pengelolaan yang tidak terarah, atau belum memenuhi prinsip berkelanjutan yang bisa memicu degradasi.

Salah satu cara agar ancaman dan persoalan bisa dikendalikan, adalah dengan diterapkan tata kelola perikanan yang partisipatif. Cara tersebut bisa dilakukan dalam bentuk pendampingan kepada Masyarakat oleh YASTRA untuk melaksanakan pengelolaan perikanan.

Masyarakat adat Waai melakukan pengelolaan wilayah pesisir dengan tutup Kawasan yang menjadi wilayah konservasi sebesar 50 hektar untuk melindungi sumber daya alam pesisir berupa mangrove, karang, dan biota laut lainnya yang ada di pesisir negeri Waai

Dengan sasaran yang ingin dicapai YASTRA dari kegiatan tersebut adalah melaksanakan penutupan 50 hektar wilayah konservasi yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat ekologis dan ekonomi masyarakat pesisir disekitar 50 hektar wilayah tersebut

Selain itu, ada juga proses untuk menyepakati lokasi penutupan 50 hektar wilayah konservasi adalah dengan adanya kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh pemerintah negeri, Saniri negeri, tokoh adat, tokoh agama, tokoh Pendidikan dan pemudah serta perwakilan Perempuan dan juga diperkuat dengan Peraturan Negeri (PERNEG) Waai dan penyadartahuan kepada Masyarakat tentang kondisi terumbu karang, mangrove dan biota lainnya.

Pentingnya melaksanakan tata kelola perikanan wilayah pesisir, adalah karena persoalan tata kelola laut dilatarbelakangi dominasi nelayan skala kecil dalam produksi perikanan.

Dengan demikian, cara paling efektif yang dinilai bisa mengembalikan praktik perikanan menjadi lebih baik, adalah dengan melaksanakan tata kelola yang partisipatif dengan melibatkan para pihak terkait yang kompeten. Yang salah satu pihak harus terlibat adalah Pemerintah dan juga masyarakat pesisir, termasuk nelayan skala kecil dan tradisional di dalamnya. Pada proses tersebut, ada banyak kegiatan yang dilakukan untuk mendukung perbaikan tata kelola.

Namun, penerapan pendekatan partisipatif membutuhkan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan, misalnya Pemerintah pemerintah negeri, Saniri negeri, kawang laut, tokoh adat pembeli/Perusahaan, asosiasi, perbankan dan pengguna laut lainnya. Selain itu, perlu juga digelar program pemberdayaan masyarakat melalui pendataan partisipatif dan fasilitasi pengambilan keputusan di tingkat local.

Indikator lima adalah :

Penetapan tata kelola wilayah pesisir disepakati oleh masyarakat

Penetapan tata Kelola wilayah pesisir yang dihadiri oleh pemerintah negeri Waai, Saniri negeri Waai, Tokoh agama negeri Waai, Tokoh pendidikan negeri Waai, Ketua perempuan negeri Waai, Ketua laki-laki negeri Waai, Ketua pemuda negeri Waai, Tokoh adat negeri Waai, Ketua Kawang negeri Waai. Dan menyepakati tentang perlindungan sumber daya alam di wilayah negeri Waai, sekaligus menandatangani kesepakatan pada hari jumat, tanggal 22, bulan juli tahun 2022 nomor 01/KB-SN/VII/2022

Penandatanganan dilaksanakan di ruang serba guna gereja GPM negeri Waai. Dan juga disaksikan oleh tim hukum YASTRA, tim lapangan YASTRA dan kepala kecamatan Salahutu.

Output 2 Kesepakatan perlindungan keaneka-ragaman hayati dan pengelolaan wilayah pesisir terbangun secara partisipatif serta dijalankan oleh masyarakat.

Indikator pertama adalah :

Masyarakat menyepakati penyusunan peraturan negeri

Pelaksanaan kegiatan penyusunan PERNEG sebanyak 10 kali yang diikuti oleh pemerintah negeri Waai, Saniri negeri Waai, Tokoh agama negeri Waai, Tokoh pendidikan negeri Waai, Ketua perempuan negeri Waai, Ketua laki-laki negeri Waai, Ketua pemuda negeri Waai, Tokoh adat negeri Waai, Kawang laut dan darat negeri Waai.

Kesepakatan penyusunan PERNEG diwarnai dengan berbagai usulan saran dan tanya jawab. Usulan yang sering disampaikan dalam beberapa pertemuan tersebut adalah “ **jangan hanya membuat PERNEG di laut dan pesisir tapi juga harus buat di darat** “ dengan alasan mereka bahwa daratlah yang membuat laut mejadi rusak, selain tangan manusia.

Maka dengan berat hati, namun telah dikonsultasikan dengan pihak BURUNG Indonesia, maka dibuatlah PERNEG laut, pesisir dan darat

Indikator kedua adalah :

Masyarakat memberikan masukan konstruktif kebutuhan isi peraturan negeri

Dalam berbagai pertemuan yang dilaksanakan oleh tim hukum YASTRA dan tim lapangan YASTRA, di Gedung serbaguna pemerintah negeri maupun Gedung serbaguna gereja GPM Waai diwarnai dengan berbagai masukan oleh perwakilan Masyarakat negeri Waai sehingga isi peraturan negeri tentang perlindungan sumber daya alam di negeri Waai sangat padat yang terdiri dari :

pesisir/laut terdiri dari 5 bab 18 pasal, 63 ayat dan 53 sub ayat.

Dan untuk darat terdiri dari 7 Bab 27 pasal 65 ayat 135 sub ayat.

Sehingga totalnya menjadi 12 bab 45 pasal 128 ayat dan 181 sub ayat

Indikator ketiga adalah :

Masyarakat menyepakati peraturan negeri tentang pengelolaan pesisir

Dari isi-isi peraturan negeri yang telah disepakati oleh perwakilan Masyarakat negeri Waai selama 10 kali pertemuan dan oleh tokoh agama telah disosialisasikan oleh gereja, baik lewat ibadah minggu maupun oleh ibadah harian dirumah-rumah maka dapat dikatakan bahwa 90 % Masyarakat negeri Waai menyetujui dan menyepakati peraturan negeri baik laut/pesisir dan darat tentang pengelolaan sumber daya alam. Dikarenakan sumber daya alam perlu dilindungi untuk kebutuhan Masyarakat negeri Waai. Hal ini juga sejalan dengan RENSTRA jemaat negeri Waai tentang pengelolaan sumber daya lama di jemaat negeri Waai.

Output 3. Kelompok perempuan dan laki-laki di Negeri Waai mampu menciptakan produk makanan olahan berbahan dasar ikan dari praktek penangkapan ikan

Indikator pertama adalah :

50 % peserta pelatihan mampu menjalankan produksi bakso ikan dan abon ikan

20 peserta perempuan yang mengikuti pelatihan pembuatan bakso ikan di ruang serbaguna negeri Waai pada tanggal 11 mei 2023, telah mampu menjalankan produksi bakso dan abon berbahan dasar ikan dan diantaranya baru 50 % yang bisa melaksanakan penjualan bakso berbahan dasar ikan. Hal ini dikarenakan terkendala dengan biaya. Untuk itu YASTRA berusaha untuk mendampingi mereka agar bisa mendapat pinjaman lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tingkat bunga yang sangat rendah

Indikator kedua adalah :

Kelompok nelayan mampu menerapkan perikanan yang ramah lingkungan

Indikator ini tidak tercaai dikarenakan usulan proposal tentang kegiatan alat tangkap ramah lingkungan (rumpon) dan pelatihan tentang pembuatan rumpon tidak dapat dibiayai oleh Burung Indonesia, namun oleh direktur YASTRA yang telah memiliki pengetahuan tentang pembuatan rumpon sejak tahun 2.000, dalam pelaksanaan pertemuan selalu menyentil tentang

sistim penangkapan yang ramah lingkungan berupa alat tangkap baik rumpon maupun alat tangkap tradisional seperti bubu dan tonda selalu disampaikan. Agar dengan alat tangkap ini baik pesisir maupun laut tetap terjaga dan terlindungi.

IV. PERUBAHAN

1. Pengurangan ancaman terhadap spesies prioritas

Nama spesies prioritas	ancaman	Status	Dokumen Verifikasi
Penyu Dugong Karang Mangrove Lamun		Turun 60 % Turun 60 % Turun 90 % Turun 90 % Turun 90 %	

2. Peningkatan Pengelolaan terhadap KBA

Nama KBA	Bentuk peningkatan pengelolaan KBA	Luas KBA yang mendapatkan peningkatan pengelolaan	Dokumen Verifikasi
Bentangan laut Buru		30 Ha terumbu karang dan lamun serta 20 ha mangrove	

3. Perlindungan Kawasan

Nama Kawasan	Bentuk perlindungan kawasan	Luas Kawasan/ tahun penetapan	Dokumen Verifikasi
Pantai dusun kelapa dua dan pesisir negeri Waai	PERNEG dan kesepakatan bersama	50 Ha/ 2023	PERNEG dan kesepakatan bersama

4. Penerima mamfaat

- a) Karakteristik penerima mamfaat (Silahkan isi checklist pada tiap kolom yang relefan)

	JENIS KOMUNITAS
--	-----------------

NAMA KOMUNITAS	Ekonomi Subsisten	Small Landowners (pemilik lahan)	Masyarakat hukum adat	Lainnya	50 -250 jiwa	251 – 500 jiwa	501 – 1.000 jiwa	Diatas 1000 jiwa	UKURAN KOMUNITAS PENERIMA MAMFAAT				
WAAI	2.076 KK	1.859 KK	1.859 KK	217 KK									

b) Jumlah penerima mamfaat

Penerima mamfaat langsung adalah mereka yang langsung terlibat dan langsung mendapat mamfaat dari program, dihitung per jiwa dan bukan perkeluarga.

Dibuktikan dari daftar hadir dan pendokumentasian lainnya (misalnya data monitoring)

Penerima mamfaat tidak langsung adalah para penduduk desa serta pihak-pihak lain yang juga dapat memetic mamfaat dari program, misalnya supplier UPI, asosiasi yang mendapat bahan ikan berkualitas.

1. Mamfaat keuangan (cash benefit)

Jenis Mamfaat	Langsung		Tidak langsung	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Meningkatnya akses terhadap dunia usaha	59	32	856	151
Meningkatnya akses terhadap Lembaga keuangan	5	2	51	18
Meningkatnya akses terhadap konsumen	39	10	51	18
Meningkatnya pendapatan kurang dari Rp.500.000 per bulan	13	10	127	89
Meningkatnya pendapatan antara Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000	38	21	502	47

Meningkatnya pendapatan lebih dari Rp 1.000.000 – Rp. 3.000.000	5	1	120	13
Meningkatnya pendapatan Rp. 3.000.000 – Rp. 5.000.000	3	-	9	2
Meningkatnya pendapatan lebih dari Rp 5.000.000 per bulan	-	-	7	-

2. Mamfaat peningkatan kapasitas

Jenis Mamfaat	Langsung		Tidak langsung	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Akses terhadap data/informasi dan kesempatan untuk memahami makna data/informasi	59	32	-	-
Keterwakilan dan kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di komunitas/kelompok	23	20	-	-
Keterwakilan dan kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan	23	7	4	-
Akses terhadap pelayanan public (Mis : Kesehatan, Pendidikan, listrik)	-	2	8	11
Pengakuan atas kearifan local dan tata Kelola lokal	59	32	856	151
Pelatihan/diskusi/lokakarya (lampirkan kompilasi nama peserta pelatihan dan topik pelatihan untuk memastikan tidak ada penghitungan ulang)	59	32	-	-

NO	NAMA PESERTA	KETERANGAN
1	Dereck Bakarbessy	Raja
2	Crosnier Delima	Ketua Saniri
3	Stevi Tapilaha	Wakil Ketua Saniri
4	Pdt. T. Leatemia	Ketua Majelis Jemaat Waai
5	Erasmus Pattireuw	Pelayanan Laki2 Gereja
6	Ny. J. Hatttu, SPd.	Kepala Sekolah SD N 25
7	Berty Kayadoe	Anggota Saniri
8	Ny. Sherly Manuputty	Tokoh Perempuan
9	Nn. A. Matulesy	Kepala Sekolah SD N 163
10	Kevin Uperessy	Anggota Kalesang
11	Jefri Reawaruw	Sekretaris Saniri

12	J. Haumahu	Kepala Sekolah SD N 224
13	Rony Habibuw	Anggota Saniri
14	P. Kalay	Anggota Saniri
15	W. Kayadoe	Anggota Saniri
16	Elwin Rumahlaiselan	Anggota Saniri
17	M. Tahitu	Anggota Saniri
18	Yohanis Risambesy	Ketua Mungare
19	Stevy Tuhumury	Pegawai Pemerintah Negeri
20	John Lewaru	Pegawai Pemerintah Negeri
21	J. Ririhatuela	Kewang Darat
22	H. Risambessy	Anggota Saniri
23	R. Matakupan	Tokoh Pendidikan
24	E. Matakupan	Pegawai Pemerintah Negeri
25	M. Salamony	Anggota Saniri
26	E. Tuhalauruw	Anggota Saniri
27	Y. Tuhalauruw	Kewang Darat
28	D. Tahtu	Pegawai Pemerintah Negeri
29	Y. Risambessy	Kewang Laut
30	Edwin Reawaruw	Kewang
31	S. Reawaruw	Tokoh Adat
32	S. Matakupan	Tokoh Adat
33	R. Pattisia	Anggota Saniri
34	Ben Walasary	Ka. Seksi Pemerintah Negeri
35	Baltazar Patipeilohy	Kewang
36	B. Matakupan	Kepala Soa
37	J. Pattisia	Marinyo
38	S. Tuasela	Kepala Soa
39	J. Tubalawony	Kepala Soa
40	M. Pattimukay	Kepala Soa
41	Lazarus Titapasanea	Anggota Saniri
42	Johanis Risambessy	Sekretaris Pemerintah Negeri
43	Ny. Syeni Makatita	Guru
44	Wellem Kayadoe	Anggota Saniri
45	Edgarsito Lucas	Anggota Kalesang
46	Jordi Manuputty	Anggota Kalesang
47	Nn. Fanny Manuputty	Anggota Kalesang
48	Nn. Fera Papilaya	Anggota Kalesang
49	Nn. Atyka Kayadoe	Anggota Kalesang
50	Andre Tuhalauruw	Anggota Kalesang
51	Nn. Astri Kayadoe	Kaur Umum Pemerintah Negeri
52	Ny. Itha Parera	Perempuan Bameti
53	Stelan Lopulalan	Anggota Kalesang
54	Amos Tahitu	Anggota Saniri
55	Piter Kayadoe	Anggota Saniri

56	Ijak Mose	Anggota Kalesang
57	Jacob Tahitu	Kewang
58	Fredo Laritmase	Kewang Laut
59	Z. Pattisia	Anggota Saniri
60	Pither Tuasela	Tokoh Adat
61	Simon Tahitu	Kasi Pelayanan
62	Jantje Patinama	Tokoh Pendidikan
63	Agustinus Matulesy	Tokoh Pendidikan
64	Boy Salamony	Anggota Saniri
65	Rudy Tahalauruw	Masyarakat
66	Ari Delima	Masyarakat
67	Ny. Liling Tusmain	Perempuan PKK
68	Ny. Ata Tusmain	Perempuan PKK
69	Ny. Nona Reawaruw	Perempuan PKK
70	Ny. Mia Tarso	Perempuan PKK
71	Ny. Wa Juni	Perempuan PKK
72	Ny. Wa Ena	Perempuan PKK
73	Ny. Merlin Talapessy	Perempuan PKK
74	Ny. Christin Pasanea	Perempuan PKK
75	Ny. Ati	Perempuan PKK
76	Ny. Vin Bakarbessy	Perempuan PKK
77	Ny. Retha Pical	Perempuan PKK
78	Ny. Bersa P.	Perempuan PKK
79	Ny. Mada Salamony	Perempuan PKK
80	Ny. Desy Tuhumury	Perempuan PKK
81	Ny. Wa Iya	Perempuan PKK
82	Ny. Tin Tahitu	Perempuan PKK
83	Ny. Fany Delima	Perempuan PKK
84	Ny. Viona Sopacua	Perempuan PKK
85	Ny. Lady Ririhatuela	Perempuan PKK
86	Nn. Meike Risambesy	Anggota Kalesang
87	Elisa Salamony	Pegawai Pemerintah Negeri
88	Frandi Ririhatuela	Anggota Kalesang
89	Maryo Kayadu	Anggota Kalesang
90	Wiland Kailola	Anggota Kalesang
91	Yakob Reawaruw	Anggota Kalesang

3. Mamfaat pelayanan alam pesisir/ laut

Jenis Mamfaat	Langsung		Tidak langsung	
			Laki-laki	Perempuan
Meningkatnya ketersediaan pangan (misalnya melalui pemamfaatan ikan, kerang,	59	32		

kepingting dalam ekosistem mangrove, ataupun meningkatnya stok ikan karena adanya bank ikan			-	-
Peningkatan ketangguhan terhadap perubahan iklim melalui akses mitigasi dan adaptasi	59	32	507	-
Meningkatnya ketangguhan terhadap resiko bencana	59	32	507	-
Meningkatnya akses terhadap keindahan alam	59	32	856	151
Meningkatnya peluang adanya komunitas baru yang berkelanjutan	-	-	-	-

4. Regulasi kebijakan local

Nama regulasi/Kebijakan	Ruang lingkup (nasional, local, desa)	Topik	Hasil yang diharapkan
Peraturan Negeri (PERNEG)	Lokal	Perlindungan sumber daya alam laut, pesisir dan darat	100 % Masyarakat akan patuh terhadap aturan
Kesepakatan bersama	Lokal	Pembuatan PERNEG Perlindungan sumber daya alam laut, pesisir dan darat	100 % Masyarakat patuh terhadap kesepakatan

5. Jaringan kerja

Nama jaringan kemitraan	Ruang lingkup (nasional, local, desa)	Tujuan penetapan	Tahun penetapan

6. Bentang laut/laut produktif

Nama benteng alam produktif	Bentuk peningkatan pengelolaan benteng alam produktif	Luas benteng alam produktif yang mendapatkan peningkatan pengelolaan	Dokumen Verifikasi
Dusun kelapa dua dan perairan Waai	Wilayah koserfasi	50 Hektar	PERNEG Kesepakatan bersama

V. PEMBELARAN

Kegiatan yang berhasil dengan baik antara lain :

1. Pertemuan sosialisasi program kepada pemerintah negeri, saniri negeri, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan dan tokoh Perempuan berhasil dengan baik karena didukung oleh semua tokoh Masyarakat yang ada di negeri Waai. Namun sebelumnya tim YASTRA melakukan pendekatan partisipatif dengan menghubungi semua tokoh-tokoh Masyarakat dan pemerintahan neger Waai
2. Pelatihan pemetaan partisipatif sumberdaya pesisir kepada masyarakat nelayan dan pemangku kepentingan lain.
Kegiatan dilaksanakan dengan baik yang dilakukan oleh organisasi pemudah yang disebut Kalesang. Strategi yang dijalankan oleh YASTRA adalah pendekatan dengan raja negeri Waai untuk menentukan siapa orang yang akan dilibatkan untuk melaksanakan pemetaan partisipatif, dan oleh raja negeri Waai merekomendasikan pemudah yang telah dibentuk oleh pemerintah negeri Waai yang disebut Kalesang (Bahasa local) sedangkan Bahasa Indonesia disebut sebagai organisasi pemuda peduli negeri Waai
3. Survei dan pemetaan lapangan wilayah pesisir dan laut
Pemudah kalesang yang melaksanakan pelatihan pemetaan langsung dilibatkan untuk mengadakan survey dan pemetaan lapangan, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan berhasil dijalankan
4. Lokakarya penyepakatan daerah perlindungan laut desa seluas 50 ha di desa Waai.
Lokakarya dilaksanakan di ruang serbaguna gereja GPM Waai yang menghadirkan pemerintah negeri, Saniri negeri, tokoh agama, tokoh Pendidikan, Saniri, kawang darat dan laut, pemudah. YASTRA berupaya untuk mendatangkan narasumber yang berkualitas dan sebelumnya YASTRA menginformasikan kepada Masyarakat bahwa narasumber ini adalah Prof. DR. Bob Mosse dari Universitas Pattimura selain sebagai dosen perikanan juga

beliau adalah pembantu rector II universitas Pattimura Ambon. Dengan demikian kehadiran mereka sangat banyak walaupun oleh YASTRA sudah berupaya untuk membatasi undangan dikarenakan ketentuan proposal

5. Pertemuan tiga batu tungku Negeri Waai

Dalam rangka membuat PERNEG perlu dilakukan pertemuan dengan tiga batu tungku (pemerintah/Saniri negeri, tokoh agama dan tokoh Pendidikan) sehingga kegiatan pertemuan pembuatan PERNEG bisa berjalan dengan baik. Cara yang dibuat oleh YASTRA, dengan mengadakan pendekatan partisipatif dan menjelaskan maksud kedatangan dan tujuan dilaksanakannya pertemuan ini. Sehingga pertemuan tersebut dinyatakan sangat berhasil

6. Pelatihan teknik penyusunan peraturan negeri

Sebelum masuk pada penyusunan PERNEG tim YASTRA melaksanakan pendekatan dengan tokoh-tokoh seperti pemerintah/Saniri negeri, tokoh agama dan tokoh Pendidikan dan bahkan tokoh Masyarakat dan tokoh adat untuk melaksanakan pelatihan. Dan pelatihan ini dengan narasumber adalah orang yang telah berpengalaman dibidangnya selain sebagai seorang advokat, sebagai tim pelatih pembuatan PERNEG, dan sangat mengerti soal adat istiadat di Maluku, baik pulau Ambon dan pulau-pulau Lease maupun daerah lain. Pendekatan partisipatif dan narasumber yang baik membuat kegiatan pelatihan ini bisa berjalan dengan baik dan berhasil.

Dalam pelatihan ini tim YASTRA menerima usulan dari peserta yang tidak terduga oleh YASTRA yaitu “ JANGAN CUMA MEMBUAT PERNEG DI LAUT DAN PESISIR TAPI JUGA BUAT PERNEG DARAT “, maka oleh tim YASTRA menghubungi Burung Indonesia. Dan dihari pertemuan berikutnya YASTRA menerima permintaan Masyarakat. Hal ini yang membuat Masyarakat bergebu-gebu dan sangat bersemangat untuk menyelesaikan PERNEG ini dikarenakan selama ini Masyarakat tidak pernah melindungi sumber daya alam dengan baik malah cenderung untuk merusaknya. Dilain sisi dengan adanya PERNEG ini maka fungsi serta tugas dan tanggung jawab Lembaga adat “KEWANG” berjalan sebagaimana mestinya

7. Penyusunan peraturan negeri tentang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan perairan Negeri Waai.

Karena Masyarakat yang mengikuti pelatihan sangat mengerti dengan apa yang disajikan oleh narasumber, sehingga dalam pembuatan PERNEG mereka tidak ragu dalam menyampaikan pendapat.

PERNEG yang dibuat termasuk sangat cepat, dikarenakan oleh TIM YASTRA membagi kelompok-kelompok kerja yang dipimpin oleh seorang ketua, sehingga setiap masukan diperentasikan oleh tiap kelompok dan diplenokan. Tetapi semua hasil masukan tetap dipantau oleh narasumber dan memberikan arahan kepada peserta sehingga PERNEG ini bisa berjalan dengan baik dalam waktu yang sangat singkat dan melahirkan PERNEG DARAT LAUT DAN PESISIR yang terdiri darat darat 7 Bab, 27 pasal, 65 ayat, dan 135 sub ayat. Sedangkan pesisir/laut terdiri dari 5 bab, 18 pasal, 63 ayat dan 53 sub ayat. Sehingga totalnya menjadi 12 bab 45 pasal 128 ayat dan 181 sub sub ayat

8. Lokakarya penyepakatan peraturan negeri tentang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di tingkat negeri Waai

Lokakarya ini dinyatakan berhasil karena YASTRA menerima usulan dari Masyarakat untuk membuat PERNEG darat, laut dan pesisir. Sehingga disepakatinya PERNEG ini melalui penandatanganan Bersama.

9. Konsultasi peraturan negeri dengan bagian hukum kantor Bupati Maluku tengah oleh tim Sauwa Sejahtera, pemerintah negeri, saniri negeri (6 orang, 3 hari, di Masohi).
Konsultasi dengan pihak pemerintah kabupaten Maluku Tengah sampai dengan laporan ini diturunkan masih tetap berjalan (3 kali berangkat ke Masohi), hal ini dikarenakan PERNEG yang dibuat cukup padat dan perlu oleh pihak pemda maluku Tengah yang dalam hal ini adalah biro Hukum mengkonsultasikan juga dengan pihak instansi terkait. Karena PERNEG ini juga perlu ada tata ruang yang baik. Untuk itu informasi terakhir senin tanggal 4 september 2023 PERNEG sudah final hanya menunggu tanda tangan dari Bupati Maluku Tengah, sementara yang ada sekarang ini adalah pejabat bupati Maluku Tengah.
10. Kampanye tentang jenis ETP di negeri Waai melalui media komunikasi berupa baliho.
Kegiatan pemasangan baleho di negeri Waai lebih tepat di wilayah pesisir negeri Waai sehingga dapat dilihat oleh semua orang, baik Masyarakat Waai maupun masarakat luar negeri Waai yang selalu dating disekitar perairan untuk duduk santai ditalit pesisir negeri Waai
11. Monitoring dan evaluasi implementasi kesepakatan tata kelola
Walaupun kegiatan telah selesai dan masih menunggu hasil PERNEG dari kabupaten Maluku tengah tetapi YASTRA tetap melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kesepakatan tata kelola
12. Asesment usaha bidang perikanan dan karakteristik perikanan tangkap Negeri Waai
Assesmen dilakukan oleh pemudah kalesang. YASTRA memilih pemudah-pemudah ini karena mereka adalah anak-anak berpendidikan (Mahasiswa) walaupun masih semester di bawah, tapi mereka ini punya kemampuan dan energi masih bagus, serta membutuhkan sejumlah uang untuk kebutuhan Pendidikan mereka. Sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan berhasil
13. Pelatihan cara pembuatan bakso dan abon dari bahan dasar ikan kepada perempuan masyarakat nelayan.
Strategi yang dipakai YASTRA disini adalah mengadakan pendekatan dengan raja negeri Waai dan ketua PKK negeri Waai, sehingga dari mereka merekomendasikan perempuan-perempuan yang memiliki usaha dan memiliki kemampuan untuk menerima materi pelatihan yang ada sekaligus bisa direplikasi kepada sesame Perempuan yang ada di negeri Waai
14. Pelatihan teknik pembuatan kemasan produk kepada perempuan masyarakat nelayan.
Dari Perempuan yang telah direkomendasikan oleh bapak raja negeri Waai dan ketua PKK negeri Waai dan telah mengikuti pelatihan pembuatan bakso dan

abon berbahan dasar ikan, maka mereka pun diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan Teknik pembuat kemasan

15. Pelatihan pemasaran hasil olahan memakai sistem online dan teknik pembuatan blok pemasaran online kepada perempuan nelayan.
Pelatihan pemasaran hasil produk dengan sistem online juga diikuti oleh mereka yang mengikuti pelatihan pembuatan bakso dan abon memakai bahan dasar ikan dan pelatihan pembuatan kemasan produk.
Hal ini dibuat agar Perempuan-perempuan tersebut mampu memasarkan hasil produk yang mereka produksi dengan kemasan yang baik dan bagus untuk menarik perhatian konsumen.
16. Pendampingan dan monitoring kelompok usaha Perempuan.
Pendampingan dan monitoring tetap berjalan dengan sistem pendekatan person maupun kelompok sehingga dapat terbaca atau terlihat bahwa usaha mereka bisa meningkat atau tidak.
YASTRA tidak akan melepaskan mereka begitu saja tapi YASTRA tetap hadir di Waai untuk memberikan motivasi non material agar mereka tetap berjuang walaupun dalam kondisi terbatas dengan anggaran.
17. Pelatihan pembuatan RPJMDesa dan RKPDesa kepada aparat pemerintah negeri Waai, Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa negeri Waai bermuatan pengelolaan pesisir untuk periode dan tahun berikutnya, Sosialisasi dokumen Peta, dokumen Peraturan Negeri dan dokumen RPJMDesa berbasis pengelolaan sumber daya wilayah pesisir negeri Waai kepada seluruh lapisan masyarakat
Kegiatan ini tidak dapat terlaksana dikarenakan pemerintah negeri dan staf pemerintah sudah mendapatkan pelatihan dari pemerintah kecamatan Salahutu.
Hanya untuk sosialisasi peta, YASTRA mengundang pemerintah dan badan Sanitasi negeri serta tokoh adat, kewartu, tokoh Pendidikan dan tokoh agama untuk mensosialisasi peta tersebut sehingga dapat dimengerti dimana letak lokasi konservasi dan dimana terletak wilayah yang dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat maupun pemanfaatan terbatas.

VI. STATUS KEUANGAN

- a. Pemasukan : 256.300.000
- b. Pengeluaran : 262.334.529
- c. Saldo : - 6.034.529